



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 238/23122008
HARI : SELASA
TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	China-RI teken fasilitas kredit US\$1 miliar	3
	Orang Indonesia Berstatus "Stateless" di Australia Ingin Ikut Pemilu	3
	Kaisar Jepang tampil di muka publik	4
	China Tidak Lagi Jadi Ancaman Ideologis Indonesia	5
	AS Dikabarkan Niat Berunding dengan Taliban	5
	China Menentang Proteksionime	6
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	SBY wins support of 'Kadin Party' for 2nd term	6
	Presiden dan Ribuan Orang Berkumpul di Monas	7
	Elections commission tells pollsters to register	7
	SBY Raih People of The Year	8
	Hasil Survei: Publik Makin Percaya kepada Duet SBY-JK	9
	B. EKONOMI	
	Rupiah Terpuruk Selasa Pagi, Tertekan Kebutuhan Dolar Musiman	10
	BPK segera bentuk AKN khusus	11

	C. SOSBUD		
		Tiap Bulan Malaysia Deportasi 400 WNI	11
		Wapres Minta Pengusaha Tidak Liburan ke Luar Negeri	12
	D. HANKAM		
		Kriminalitas Menurun 5,2 Persen	13
		KSAU Tegaskan Infrastruktur Sukhoi Sudah Siap	13
	E. HUKUM		
		Dua Mantan Dubes Diperiksa	14
		Dalam Setahun, 26 Juta Anak Dilanggar Haknya	15
	F. OLAHRAGA		
		Indonesia Peringkat Kedua di POM ASEAN	15
		Kampanye Sepak Takraw Indonesia Menuju Olimpiade	16
	G. LINGKUNGAN HIDUP: Tidak Ada		
	III. ARTIKEL		
		"Pintu Darurat" Amendemen Komprehensif UUD 1945 oleh Rafiuddin Munis Tamar	16
		Harga BBM Bisa Turun Lagi Rp 1.000 per Liter oleh Dito Ganinduto	18
	IV. LAIN-LAIN: Tidak Ada		
	V. EDITORIAL		
		Court reigns supreme	20

Jakarta, 23 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. China-RI teken fasilitas kredit US\$1 miliar

Pemerintah Indonesia dan China menyepakati fasilitas kredit pembeli (Buyers Credit Facility-BCF) senilai US\$1 miliar guna mempermudah pengadaan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Demikian diungkapkan Wapres Jusuf Kalla se usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) BCF antara Bank Ekspor Impor China dan Departemen Keuangan bersama Wakil Perdana Menteri China Li Keqiang. Selain Wapres, turut menyaksikan acara penandatanganan itu Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Pangestu, Menneq BUMN Sofyan Djalil, Menpora Adyakasa Dault, Menlu Hasan Wirayuda dan Kepala BKPM Muhammad Lutfi.

Menurut Kalla, pemberian fasilitas tersebut merupakan bentuk kerja sama kedua negara dalam meningkatkan hubungan ekonomi di samping bekerjasama dalam menangkal dampak krisis keuangan global. "Mereka setuju US\$1 miliar. Itu sebenarnya untuk kepentingan kedua pihak. Berarti kita beli barang buatan China sehingga ekonomi Indonesia dan China bergerak," ujarnya.

Namun, dia menyebutkan pembelian barang secara kredit senilai US\$1 miliar tersebut tidak berlaku bagi produk atau barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. "Pembelian itu atas apa saja yang tidak kita produksi," tegasnya.

Kalla mencontohkan peralatan mesin tertentu yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian pengadaan barang lewat impor tersebut tidak mengganggu pasar produk dalam negeri. Dia menjelaskan kerja sama kredit tersebut baru bisa diwujudkan setelah dilakukan pembicaraan teknis antara kedua pejabat pemerintah. Sebelumnya kedua pejabat pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman di bidang keolahragaan dan kepemudaan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi mengatakan kerja sama fasilitas kredit itu bagi Indonesia sangat penting. Pasalnya, sektor riil saat ini tengah menghadapi kesulitan likuiditas kendati realisasi investasi sampai November sudah mencapai US \$16,08 miliar.

"Kerja sama ini diharapkan berkembang untuk men-jumpstart ekonomi kita," katanya se usai menyaksikan acara penandatanganan MoU tersebut.

Adapun untuk China, ujar dia, pemberian fasilitas itu akan membuat pabriknya bergerak dan membuka lapangan kerja lebih luas. Sementara bagi Indonesia kredit itu akan mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur di samping meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kita meski lawan sama-sama keadaan ekonomi global dimana China beri BCF supaya kita beli produk dia, pabriknya jalan, Indonesia bisa perbaiki keadaan dengan membangun infrastruktur sehingga ada nilai tambah," jelas Lutfi. (Bisnis Indonesia)

2. Orang Indonesia Berstatus "Stateless" di Australia Ingin Ikut Pemilu

Beberapa orang Indonesia yang sudah lama menetap di wilayah negara bagian New South Wales (NSW), Australia, dengan status "stateless" karena tidak lagi memiliki

kewarganegaraan RI menanyakan kemungkinan bagi mereka bisa ikut Pemilu 2009 kepada Konsulat Jenderal RI di Sydney.

"Ada beberapa warga masyarakat asal Indonesia yang sudah menetap lama di Sydney namun tidak lagi memiliki dokumen kewarganegaraan RI menanyakan apakah mereka masih punya hak memilih dalam Pemilu 2009," kata Anggota PPLN Sydney, Pratito Suharyo, kepada ANTARA di Brisbane, Senin malam.

Masalah itu sempat disampaikan dalam rapat koordinasi tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para wakil Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) se-Australia, Papua New Guinea, negara-negara di Pasifik Selatan, Laos, dan Selandia Baru 13-14 Desember lalu, katanya.

Pratito mengatakan, selama warga masyarakat asal Indonesia itu bisa membuktikan dengan dokumen yang dimiliki bahwa mereka benar "warga negara Indonesia" (WNI), keinginan mereka untuk bisa ikut Pemilu dapat dipertimbangkan tetapi keputusan akhir tetap di tangan otoritas berwenang di Jakarta.

Ditemui di sela acara sosialisasi Pemilu 2009 di kampus Universitas Queensland (UQ) St.Lucia, Brisbane, yang diikuti 50-an WNI, minister counselor fungsi penerangan, sosial dan budaya KJRI Sydney itu mengatakan, pada prinsipnya, PPLN Sydney berupaya membantu WNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009.

Karena itu, menurut dia, PPLN Sydney yang membawahi tiga negara bagian di Australia akan tetap menerima pendaftaran warga negara Indonesia (WNI) yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 sebagai upaya menekan jumlah "golongan putih" (Golput) di luar negeri.

Namun, bagi WNI yang akan datang dan menetap di wilayah New South Wales (NSW), Queensland, dan Australia Selatan mulai awal 2009, PPLN Sydney meminta mereka agar membawa surat bukti telah mendaftar Pemilu di Tanah Air supaya mereka tidak masuk ke dalam daftar WNI yang belum mendaftar, katanya.

Pratito mengatakan, pihaknya terus memperbaharui data pribadi dan alamat WNI yang sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT) serta memasukkan para WNI yang baru mendaftar ke dalam DPT tambahan sebelum melangkah pada tahapan pengiriman surat-surat pemberitahuan lewat pos ke masing-masing alamat calon pemilih.

Berdasarkan data PPLN Sydney hingga 22 Desember 2008, jumlah WNI yang masuk DPT mencapai 12.752 orang dan DPT tambahan mencapai 4.435 orang. Dari 12.752 orang yang masuk DPT, sebanyak 10.298 orang di antaranya berdomisili di wilayah NSW, 1.818 orang di Queensland, dan 636 orang di Australia Selatan.

"Bagi WNI yang belum mendaftar, selama mereka bisa membuktikan diri bahwa mereka benar-benar WNI, kita minta mereka segera mendaftar melalui email ppln.sydney@gmail.com," kata Pratito.

Berdasarkan jumlah WNI yang masuk DPT dan DPT tambahan, PPLN Sydney berencana mendirikan sekitar 30 tempat pemungutan suara (TPS) di tiga negara bagian Australia yang masuk wilayah kerjanya. (Antara)

3. Kaisar Jepang tampil di muka publik

Kaisar Akihito akhirnya muncul di hadapan publik Jepang di hari ulang tahunnya yang ke-75 setelah sempat mendapat perawatan dan dikabarkan mengalami stres memikirkan suksesi kekaisaran Jepang.

Wartawan Antara Benny Butar-butar yang langsung menyaksikan dari Istana Kekaisaran Jepang di Tokyo pada hari ini melihat Kaisar Akihito yang didampingi Puteri Michiko dalam kondisi sehat dan tersenyum kepada rakyat Jepang dan melambaikan tangan.

Rakyat Jepang menyambut lambaian tangan kaisar dengan mengangkat tangan dan menyuarakan teriakan 'Tenno Haika Banjai' berkali-kali.

Kemunculan Kaisar membuat rakyat lega karena sebelumnya Kaisar membatalkan jumpa pers di hari ulang tahun yang ke-75 yang tepat jatuh pada 23 Desember, yang juga dijadikan sebagai hari libur nasional.

Dalam pidatonya yang berlangsung selama lima menit, Kaisar berdoa agar kehidupan rakyat Jepang tetap sejahtera meskipun saat ini masih dilanda kesulitan akibat krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Jepang.

"Saya berdoa kehidupan ekonomi bisa membaik pada tahun depan meskipun masih dalam keadaan ekonomi yang sulit", kata Kaisar.

Lebih jauh Kaisar mengingatkan tahun depan juga akan menjadi saat yang cukup menyulitkan sehingga rakyat diminta menjaga kesehatan dan terus bekerja keras agar kehidupan menjadi lebih baik.

Di awal sambutannya Kaisar juga sempat menyambut ribuan rakyat Jepang dan juga warga asing. Suasana dingin yang menyelimuti Jepang tidak mengendurkan semangat rakyat untuk menunggu di lapangan istana sejak pkl. 7.00 waktu setempat, sedangkan pintu gerbang baru dibuka pada pkl. 9.30.

Kaisar berpidato dari depan balkon istana dalam ruangan kaca anti peluru pada pkl 10.20 waktu setempat dan berbicara selama lima menit, dengan didampingi Pangeran Naruhito dan istri, serta putra keduanya yakni Pangeran Akishino dan Putri Kiko. (Bisnis Indonesia)

4. China Tidak Lagi Jadi Ancaman Ideologis Indonesia

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menilai China saat ini tidak lagi menjadi ancaman ideologis bagi Indonesia, sekalipun negara tersebut sampai kini masih menganut paham komunis.

"Saya melihat China tidak lagi merupakan negara yang memiliki ancaman bagi Indonesia untuk penyebaran ideologi komunis, sehingga hubungan kedua negara tidak ada masalah," kata Ginandjar, di Beijing, Selasa.

Ginandjar bersama sejumlah anggota DPD berada di Beijing untuk melakukan pertemuan secara terpisah dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (NPC) China Wu Bangguo, Ketua Badan Konsultasi Politik Rakyat China (CPPCC) Jia Qinglin, Wakil Ketua Komite Nasional CPPCC Bai Lichen, serta Ketua Komite CPPCC Kotamadya Beijing Yang Anjiang.

Kunjungan Ginandjar dan rombongan selanjutnya Selasa (23/12) dilanjutkan ke Kunming, ibukota Provinsi Yunan, China selatan, untuk bertemu dengan pimpinan CPPCC Yunan dengan tujuan untuk saling tukar pikiran dan pengalaman antar parlemen daerah kedua negara.

Menurut Ginandjar, China tentunya sadar dan paham betul bahwa zaman sekarang ini penyebaran ideologi komunis ke sejumlah negara sudah tidak relevan lagi, sehingga sangat tidak mungkin China akan mengembangkan komunis ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia.

"Secara politik ancaman Indonesia dari China tidaklah ada, apalagi sampai adanya keinginan menyebarkan komunis ke Indonesia. Saya melihat itu sudah tidak ada relevansinya lagi di masa sekarang," tegas Ginandjar.

Terus meningkatnya kerjasama politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya hingga ekonomi, dinilai tidak akan dijadikan China untuk melakukan penyebaran paham ideologinya ke Indonesia.

Selain itu dengan terus meningkatnya saling mengunjungi para pejabat tinggi pemerintahan, negara dan bahkan masyarakat antara kedua negara juga merupakan bukti bahwa hubungan Indonesia-China adalah saling membutuhkan dan menguntungkan.

Ancaman, katanya lebih lanjut, justru dari bidang ekonomi yakni dengan makin banyaknya berbagai produk China yang "membanjiri" pasar Indonesia sehingga banyak pula produk lokal yang terdesak oleh produk impor.

Baik Indonesia dan China saat ini sama-sama kuat memproduksi sepatu, tekstil dan produk tekstil, hingga mainan anak-anak, sehingga untuk produk-produk tersebut seringkali terjadi "perang" antara kedua negara.

Meskipun demikian, katanya, hal itu sebaiknya justru bisa memicu kedua negara untuk bisa saling meningkatkan hubungan perdagangan, yang antara lain bisa saling melengkapi dan membutuhkan. (Antara)

5. AS Dikabarkan Niat Berunding dengan Taliban

Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan mungkin akan mengadakan pembicaraan dengan Taliban moderat, kata Dubes AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zalmay Khalilzad.

"Saya pikir kami perlu merangkul unsur Taliban yang terbuka untuk rekonsiliasi," kata Khalilzad di jaringan televisi berita CNN.

"Tapi, untuk mencapainya, pemerintah Afghanistan dan pasukan koalisi internasional perlu dalam posisi yang jauh lebih kuat dibanding saat ini."

"Saya pikir syaratnya adalah pertama-tama membuat yang bisa direkonsiliasikan maupun yang tidak bisa direkonsiliasikan, jadi masih sangat menggantung," katanya.

"Tapi, saya yakin ada kelompok dalam Taliban, yang bersedia untuk rekonsiliasi, dengan menambahkan bahwa beberapa dari mereka "sudah menyebrang".

Antara 20.000 hingga 30.000 tentara Amerika Serikat akan dikirim ke Afghanistan pada tengah tahun mendatang untuk menolong Kabul memerangi Taliban. Hal itu dikemukakan Laksamana Mike Mullen, Ketua Gabungan Kepala Staf Amerika Serikat, pada Sabtu.

Sisa Taliban, yang digulingkan dari pemerintah dalam serbuan pimpinan Amerika Serikat pada akhir 2001 meningkatkan serangan pada beberapa tahun terakhir, dan 2008 menjadi tahun paling berdarah.

Khalilzad menambahkan bahwa pemerintah Afghanistan yang dipimpin Presiden Hamid Karzai harus lebih jujur dan berhasil.

"Saya pikir setiap orang harus membenahi rumahnya sendiri. Pemerintah harus lebih memerangi korupsi dan memastikan bahwa unsur-unsur yang membentuk pemerintahan baru, bersatu dan tidak pecah," katanya.

Khalilzad lahir di Afghanistan dan pindah ke Amerika Serikat saat muda. Ia menjadi dutabesar Amerika Serikat untuk Kabul sesudah Taliban jatuh dan kemudian pindah ke Bagdad. (Republika)

6. China Menentang Proteksionisme

China mengatakan pihaknya menentang proteksionisme dan menghormati peraturan perdagangan global, sebagai reaksi atas komplain AS dan Meksiko mengenai paraktek perdagangannya yang didaftarkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

China juga mengatakan pihaknya akan menggunakan peraturan WTO untuk menghadapi permintaan dua negara anggota WTO itu, yang mengupayakan konsultasi penyelesaian sengketa mengenai tuduhan subsidi ekspor yang membuat eksportir China memiliki keuntungan yang tidak fair.

"Pihak China selalu menghormati peraturan WTO dan menentang proteksionisme perdagangan," demikian Kementerian Perdagangan dalam situs internetnya.

Keputusan Washington menyeret China ke WTO dilakukan menyusul sejumlah analisis yang menyoroti puluhan program promosi China, demikian diungkap kantor Perwakilan Perdagangan AS Susan Schwab.

Amerika Serikat, kata Schwab, prihatin karena program China memperlihatkan subsidi ekspor perusahaan dan kebijakan industri proteksionis.

Dia mengatakan AS akan menggunakan "seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghadapi kebijakan industri yang bertujuan untuk promosi yang tidak fair."

Menyusul permintaan untuk konsultasi itu, kedua pihak akan memiliki 60 hari untuk menyelesaikan sengketa itu secara bilateral.

Jika resolusi tidak tercapai, arbitrator WTO kemudian akan diminta untuk membuat peraturan yang dapat dibanding oleh kedua pihak.

Komplain Washington ditargetkan pada program China yang dikenal sebagai "Merek Terkenal", yang kemunculannya bertujuan untuk mempromosikan perkembangan nama merek China global dan meningkatkan penjualan produk China di seluruh dunia. (Suara Karya)

I I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. SBY wins support of 'Kadin Party' for 2nd term

The nation's most powerful business lobby group ended its national meeting on Monday with reelected chairman Mohamad Suleman Hidayat throwing his support behind President Susilo Bambang Yudhoyono's bid for a second term in office.

Hidayat, held in high regard by members of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) for keeping the group's interests fairly high on the government's list of priorities,

said the group would continue its partnership with the government in keeping the business climate healthy.

"But we are still an independent institution... based on the (1987) Kadin law," he told reporters on the sidelines of the two-day Kadin national meeting.

"Therefore, we will continue working with the government because we have the same visions in mitigating (the impact of) the (economic) crisis and in developing our economy over the next five years."

Hidayat added he would meet with Yudhoyono soon to find ways to help each business sector cope with the crisis, and said he expected a set of policies to be issued and implemented as early as January.

However, Kadin's support for the President is not without its conditions, with the group demanding Yudhoyono put together a more solid team of economic ministers in dealing with the crisis.

"All economic ministers must be coordinated under one command, and not by their own agenda," he said.

Speculation about "disharmony" among economic ministers is rife, revolving around Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, Agriculture Minister Anton Apriyantono, Trade Minister Mari Elka Pangestu and Forestry Minister Malam Sambat Kaban.

Mulyani and Mari are considered professional appointments to the Cabinet, while Anton and Kaban are in the Cabinet solely to appease the interests of the Justice and Prosperous Party (PKS) and the Crescent Star Party (PBB), respectively.

Kadin, often dubbed "the Kadin Party", played a crucial role in backing Yudhoyono in the 2004 presidential election, after it deemed the incumbent president Megawati Soekarnoputri "unfriendly" to its interests.

Knowing full well Kadin's influence, financially and politically, Yudhoyono will have little option but to strike a deal with the group or risk being shunned, as Megawati was.

Kadin brings together most of the country's influential businesspeople at the national and provincial levels, but with a strong Golkar Party slant.

Hidayat, for one, is a Golkar politician specifically tasked by Vice President Jusuf Kalla, a top Kadin member himself, with managing the group.

Coordinating Minister for the People's Welfare Aburizal Bakrie was Kadin chairman before Hidayat.

Industry Minister Fahmi Idris, a senior Golkar politician, is also a senior member of the group.

Sofjan Wanandi, chairman of the Indonesian Employers Association (Apindo), said Hidayat was the right person to fill the position, especially in dealing with future challenges in the wake of the global economic downturn.

"I believe we have to work together to get out of this (economic) crisis, and (Hidayat) has the ability to embrace all of us," said Sofjan, a close ally of Hidayat's in lobbying the government.

"That's why no Kadin members tried to challenge him in the race to be chairman, making him the only candidate." (The Jakarta Post)

2. Presiden dan Ribuan Orang Berkumpul di Monas

Sekitar 5.000 orang memadati Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, tempat upacara Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial ke-50, Selasa (23/12). Acara ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri kabinet.

Dimulai pukul 09.00, acara diisi dengan pengumuman pemberian penghargaan kepada sejumlah orang dan lembaga yang peduli terhadap masalah sosial serta ekonomi. Tiga artis yaitu Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya, akan menghibur pengunjung.

Di antara agenda upacara yaitu penyerahan kredit usaha rakyat (KUR) dari enam bank pemerintah senilai Rp 12,249 triliun. Kredit ini diberikan kepada lebih dari 1,5 juta debitur dan bantuan penanggulangan bencana alam Departemen Sosial.

Juga diserahkan penghargaan dari Menteri Sosial Bachtiar Chamsah kepada Karang Taruna dan organisasi pekerja sosial. Adapun Presiden Yudhoyono menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada Bambang W Soeharto dari DKI Jakarta dan Anna Anggarini dari Jawa Barat. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun

diperoleh Kepala Subagian Kerjasama Regional dan Internasional, Biro Perencanaan Departemen Sosial, Sri Wuryaningsih. (Tempo Interaktif)

3. Elections commission tells pollsters to register

The General Elections Commission (KPU) has said any agencies conducting public opinion surveys and quick counts, or exit polls, should report their funding and their legal status to the commission, *Kompas.com* has reported.

"We ask the agencies which plan to participate in the coming 2009 general elections to register at KPU and explain their legal status," Andi Nurpati, a commission member, announced at a KPU press conference at their offices in Jakarta on Monday.

The commission also asked the agencies to report their affiliations and their funding sources.

"The public need to know about the affiliations of these groups -- whether they are funded by certain political parties, private institutions or government bodies -- so people can judge and understand their survey results better," he said.

Observers have warned that surveys could be prone to abuse by political figures and parties.

Polling organizations, however, have challenged the KPU plan, saying the commission does not have the capacity or time to assess public opinion surveys. (The Jakarta Post)

4. SBY Raih People of The Year

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin menerima penghargaan People of The Year (POTY) 2008 bidang politik yang diberikan Harian Seputar Indonesia (Koran SINDO).

Dewan Juri menilai Presiden SBY memiliki kontribusi positif di bidang politik selama 2008 serta memiliki integritas dan jiwa pengabdian pada bangsa dan negara. Penghargaan POTY 2008 diserahkan langsung oleh Pemimpin Umum Harian SINDO Hary Tanoesoedibjo kepada Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pada saat menerima penghargaan, Presiden SBY didampingi Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh. Para juri yang turut hadir dalam penyerahan penghargaan adalah Hikmahanto Juwana, Taufiequrrahman Ruki, Taufik Abdullah, Ikrar Nusa Bhakti, Bambang PS Brodjonegoro, Winny E Hassan, dan Arswendo Atmowiloto. Dari SINDO, hadir pula Wakil Pemimpin Umum Syafril Nasution, dan Pemimpin Redaksi Sururi Alfaruq.

Presiden SBY berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya. "Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada SINDO. Ini penghargaan yang pertama kali saya terima langsung," ujar Presiden SBY. Sebelumnya Presiden mengaku pernah menerima penghargaan di Hong Kong.

Namun penerimaan penghargaan itu diwakili oleh Boediono yang saat itu menjabat menteri koordinator bidang perekonomian. Presiden mengatakan, penghargaan POTY yang diberikan kepadanya sangat kredibel.

"Saya senang kalau juri independen, apalagi penilaiannya objektif. Ini bukan pesanan, saya percaya dengan metodologi POTY ini," kata Presiden. Pemimpin Umum Koran SINDO Hary Tanoesoedibjo mengatakan, tujuan diselenggarakannya POTY adalah untuk menggali apresiasi masyarakat terhadap tokoh yang dinilai telah memainkan peranan penting sepanjang Untuk mengukur penilaian publik siapa tokoh yang paling berperan dalam empat kategori tersebut SINDO menggunakan survei di sembilan kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang, dan Denpasar dengan jumlah responden sebanyak 1.620 orang.

Hasilnya, untuk kategori bidang politik diraih oleh Presiden SBY. Untuk kategori bidang ekonomi diraih Sri Mulyani Indrawati, kategori bidang hukum oleh Suciwati, dan kategori budaya diraih Deddy Mizwar. Hary mengatakan, issue of the year yang paling populer adalah pemberantasan korupsi.

Sementara isu lainnya adalah kenaikan harga minyak dunia, musibah lumpur Lapindo, krisis finansial global, anggaran pendidikan, anjloknya pasar saham anjlok, bencana alam, dan bantuan langsung tunai (BLT). Ketua Tim Juri POTY, Hikmahanto Juwana, mengatakan survei

yang dilakukan selama sebulan lebih dari 20 Oktober–28 November 2008 itu menghasilkan lima besar tokoh dalam kategori politik.

Kelima orang tokoh itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono (59,75%), Sri Sultan Hamengku Buwono X (16,48%), Megawati Soekarnoputri (6,17%), Jusuf Kalla (3,76%) dan Abdurrahman Wahid (3,58%).

"Bisa dilihat dari hasil perolehan angkanya, SBY memiliki persentase angka yang jauh lebih tinggi dibanding tokoh-tokoh lain," ujar profesor bidang hukum dari Universitas Indonesia ini. Budayawan Arswendo Atmowiloto menambahkan, penghargaan yang diberikan ini merupakan suara masyarakat." Ternyata suara di masyarakat dan suara juri hampir sama persis dalam memilih siapa penerima POTY 2008 di bidang politik," ujarnya.

Pemimpin Redaksi Koran SINDO Sururi Alfaruq mengatakan, untuk penerima penghargaan lain, yaitu Sri Mulyani Indrawati, Suciwati Munir, dan Deddy Mizwar, akan disampaikan dalam waktu dekat ke kediaman masing-masing. POTY merupakan acara rutin yang digelar SINDO setiap tahun, dimulai tahun 2005, dan terus berlanjut hingga kini.

Pada tahun pertama, pemilihan pemenang penghargaan hanya dibatasi pada tiga bidang, yakni politik, hukum serta agama. Sistem penentuan pemenang yang diterapkan pun murni berdasarkan suara terbanyak dari survei masyarakat. Seiring bergulirnya waktu, bidang yang diusung juga melebar hingga ekonomi dan budaya. Metode penentuan penghargaan pun ikut berubah.

Selain partisipasi masyarakat, sistem POTY juga melibatkan para juri (panel experts) untuk menentukan peraih penghargaan. Pada tahun ketiga pula ajang POTY semakin berwarna dengan kehadiran kategori lain selain memilih tokoh, yakni Issue of The Year. (Koran Sindo)

5. Hasil Survei: Publik Makin Percaya kepada Duet SBY-JK

Hasil jajak pendapat publik menunjukkan bahwa tingkat sentimen publik terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) semakin positif. Lebih dari 75 persen publik menyatakan suka kepada kepemimpinan SBY-JK.

Demikian hasil jajak pendapat atau survei yang dilakukan Reform Institute yang disampaikan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, di Jakarta, Senin (22/12). Dalam kesempatan itu hadir juga dua peneliti Reform Institute, Cholid Novianto dan Zaim Zaidi.

Menurut Yudi Latif, sebanyak 75,48 persen responden menyatakan tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan SBY-JK positif. Sedangkan sebanyak 22,68 persen responden menyatakan tidak suka terhadap kepemimpinan SBY-JK, dan 1,84 persen responden tidak memberikan suara.

"Setidaknya tingkat kepercayaan publik terhadap SBY-JK semakin positif dibanding survei yang sama pada Juli 2008 lalu," kata Yudi Latif.

Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan SBY-JK di bidang politik dinilai berhasil oleh sebanyak 51,68 persen responden, sementara 46,92 persen menyatakan gagal. Di bidang ekonomi, responden yang menyatakan berhasil sebanyak 29,72 persen, sedangkan yang menyatakan gagal sebanyak 67,04 persen.

Mengenai kinerja di bidang kesejahteraan sosial, sebanyak 40,36 persen responden menyatakan berhasil dan 57,28 persen responden menyatakan gagal. Menyangkut masalah ketertiban dan keamanan lingkungan, sebanyak 22,56 persen responden menyatakan kinerja SBY-JK berhasil dan sebanyak 75,4 persen menyatakan gagal.

Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai politik yang paling diinginkan sebagai pasangan koalisi yang dipilih oleh para pemilih (publik-Red). Survei ini menunjukkan koalisi yang diinginkan pemilih Partai Demokrat dengan Partai Golkar sebanyak 30 persen, koalisi yang diinginkan oleh pemilih PDIP dengan Partai Golkar sebanyak 26,74 persen.

Sedangkan untuk koalisi pemilih Partai Golkar dengan Partai Demokrat sebanyak 38,14 persen. Sementara koalisi yang diinginkan pemilih Partai Golkar dengan PDIP sebesar 15,54 persen.

Yudi Latif menilai, dari fakta ini terlihat Partai Golkar merupakan partai politik yang paling diinginkan sebagai pasangan koalisi oleh para pemilih Partai Demokrat maupun PDIP. Pemilih Partai Golkar sendiri, lanjut dia, sebagian terbesar menghendaki berkoalisi dengan Partai Demokrat, sebaliknya hanya sebagian kecil yang ke PDIP.

"Dengan demikian koalisi Partai Demokrat-Partai Golkar memiliki akseptabilitas paling tinggi dibandingkan dengan koalisi dengan PDIP," ujarnya.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan pemilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lebih menginginkan koalisi dengan Partai Golkar (21,95 persen) daripada dengan partai politik lainnya.

"Dengan demikian, dalam koalisi, di antara lima partai politik papan atas, Partai Golkar merupakan partai politik yang paling diinginkan. Sebaliknya, PDIP paling tidak diinginkan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Harian I Bappilu Pusat Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, mengatakan, pada Pilpres 2009 yang akan datang kemungkinan besar Partai Golkar tetap akan mempertahankan duet SBY-JK. Sebab, kedua pimpinan bangsa ini telah membuktikan keberhasilan mereka memimpin negeri ini.

Duet SBY -JK, kata Burhanuddin, layak dipertahankan karena selama empat tahun memimpin negeri ini nyaris tidak ada masalah berarti dalam pemerintahan mereka. "Inilah salah satu opsi yang dimiliki Partai Golkar, selain opsi-opsi lain," katanya, di Jakarta, Senin (22/12).

Seperti diketahui, dalam tubuh Partai Golkar sendiri muncul berbagai opsi pencalonan presiden. Ada yang tetap ingin mempertahankan duet SBY-JK, ada pula yang menginginkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tampil sebagai calon presiden.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, juga memberikan sinyal agar duet SBY-JK dipertahankan. Karena duet tersebut sudah membuktikan keberhasilan pemerintahan. "Kedua pemimpin ini sudah membuktikan keberhasilan kepemimpinan mereka. Jadi, kalau kita sudah sepakat menilai mereka berhasil, kenapa harus mencari duet kepemimpinan baru," kata Syarif.

Di tempat terpisah, pengamat politik dari UI, Arbi Sanit, mengatakan, mempertahankan duet SBY-JK adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil Partai Golkar. "Saya kira, bagi Partai Golkar tidak ada pilihan lain selain mempertahankan duet SBY-JK, karena dalam sistem multipartai begini sulit mencapai perolehan suara 30 persen. Satu-satunya jalan adalah mempertahankan duet SBY-JK," kata Arbi Sanit. (Suara Karya)

B. EKONOMI :

1. Rupiah Terpuruk Selasa Pagi, Tertekan Kebutuhan Dolar Musiman

Kurs rupiah di pasar spot antar bank Jakarta, Selasa pagi, merosot tajam mendekati angka Rp11.200 per dolar AS, pelemahan yang menunjukkan masih tetap tingginya permintaan pasar terhadap dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi Rp11.115/11.175 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp10.900/11.000 atau turun 215 poin.

Analisis Valas PT Bank Himpunan Saudara, Rully Nova, di Jakarta, Selasa, mengatakan permintaan dolar AS oleh pelaku pasar masih tinggi menjelang liburan akhir tahun ini sehingga rupiah kembali terpuruk.

Besarnya tekanan pasar itu, terutama disebabkan muncul permintaan dolar AS dari BUMN untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo, katanya.

BUMN seperti Pertamina dan PLN membutuhkan dolar AS untuk membayar hutang kepada kreditor sesuai jadualnya.

Meski ada sejumlah isu positif, lanjut dia, dari internal seperti pemerintah dapat pinjaman dari Inggris dan Perancis serta Bank Dunia, namun belum mendukung pergerakan rupiah.

"Kami memperkirakan tekanan pasar tidak berlangsung lama, rupiah akan kembali bergerak naik, apalagi laju inflasi Desember 2008 diperkirakan akan kembali membaik,"katanya.

Bank Indonesia (BI) sendiri telah memberikan tanda, bahwa laju inflasi Desember 2008 diperkirakan akan semakin baik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terus tumbuh, tambahnya.

Selain itu juga pemerintah telah berusaha memperkuat pasar domestik dan mengurangi impor, ujarnya.

Edwin menilai, ke depan, peluang rupiah untuk menguat kembali masih ada, bila kalau melihat pertumbuhan pasar lokal yang semakin membaik.

Apalagi ada imbauan dari para pengusaha agar bank-bank asing yang bermain derivatif hendaknya dibatasi, katanya. (Antara)

2. **BPK segera bentuk AKN khusus**

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution berjanji akan segera membentuk Auditorat Keuangan Negara (AKN) khusus paling lambat Oktober 2009 atau sebelum dirinya pensiun sebagai pimpinan BPK.

"Insya Allah sebelum saya pensiun yaitu pada Oktober 2009 akan diberlakukan AKN khusus," katanya di Jakarta, hari ini.

Pembentukan AKN merupakan salah satu upaya reorganisasi yang dilakukan BPK di tengah kondisi krisis keuangan global. AKN akan difungsikan untuk menangani pemeriksaan khusus terhadap penerimaan negara. Tujuannya agar fokus dan luas cakupan pemeriksaan bisa menjangkau seluruh penerimaan negara.

Menurut dia, pemeriksaan tematis terhadap penerimaan negara akan dijadikan fokus pemeriksaan BPK mulai tahun depan. Anwar menuturkan krisis saat ini telah menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin dan munculnya pengangguran baru. "Belum lagi pengangguran yang berasal dari TKI luar negeri yang akan banyak dipulangkan," ujarnya.

Untuk itu, tahun depan BPK akan fokus mengaudit dana bantuan untuk program Jamkesmas, Wajar Diknas 9 Tahun, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Demikian juga pemeriksaan isu strategis yang meliputi penerimaan negara termasuk bantuan yang diterima dari lembaga donor, pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemilu 2009, operasional BPD, dan transfer dana DAK, DAU & DBH.

Beberapa sektor lain yang akan ikut diaudit oleh AKN adalah royalti dari tambang, migas, dan juga penerimaan dari luar negeri. AKN juga akan memeriksa Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap. (Bisnis Indonesia)

C. **SOSBUD**

:

1. **Tiap Bulan Malaysia Deportasi 400 WNI**

Kekurangan lapangan pekerjaan dan sulitnya mengurus surat perjalanan di tanah air membuat rata-rata 300-400 warga negara Indonesia (WNI) dideportasi dari Malaysia setiap bulannya.

Perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur melaporkan para WNI pendatang ilegal tersebut umumnya bermaksud mencari pekerjaan di Malaysia, namun kerap terjaring razia rutin imigrasi setempat.

Hari Minggu (21/11) operasi imigrasi Malaysia di sebuah Kereta Tanah Melayu di Kuala Lumpur kembali menangkap 117 pendatang liar, yang 85 diantaranya berstatus WNI.

"Agak sulit memastikan jumlah WNI pendatang ilegal di Malaysia namun setiap minggu sedikitnya sekitar 100 orang (yang tertangkap imigrasi Malaysia)," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Menurutnya, sesuai hukum para pendatang ilegal ini akan ditahan terlebih dahulu di penjara setempat dan imigrasi Malaysia akan segera menghubungi pihak perwakilan Indonesia untuk proses deportasi.

Sekalipun deportasi berarti yang bersangkutan dilarang kembali ke Malaysia, tetap saja perwakilan Indonesia menemukan beberapa kasus pendatang ilegal yang berulang. "Mereka biasanya masuk kembali ke Malaysia lewat jalur-jalur tersendiri seperti di Kalimantan," kata Faizasyah. Menurut Faizasyah, tingginya jumlah WNI pendatang liar di Malaysia ini telah menjadi kasus lama yang disebabkan berbagai faktor sekaligus.

"Penyebabnya bukan karena kasus di hilir tapi di hulu, seperti karena kekurangan lapangan pekerjaan di tanah air atau karena mereka tak sanggup mengurus biaya surat-surat perjalanan," kata Faizasyah.

Lembaga Swadaya Masyarakat Imigrant Watch menemukan fakta para calon TKI yang mengurus paspor umumnya harus membayar biaya Rp 1-1,5 juta, berkali lipat dari biaya resmi yang berkisar Rp 275 ribu. Sementara menurut Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, para calon majikan Malaysia juga kerap membayar biaya perekrutan TKI untuk mengurus surat-surat perjalanan melebihi dari jumlah resmi. Secara resmi biaya rekrut TKI berkisar 3700 ringgit namun di lapangan jumlah ini kerap berlipat hingga 7000 ringgit.

“Jumlah itu membuat para majikan Malaysia sering bersepakat dengan agen (TKI di Malaysia) agar tak usah bayar 3 bulan gaji pertama. Mana ada orang yang tahan dibuat begitu?”, kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Abidin Zain. Tingginya biaya rekrut ini juga membuat para majikan Malaysia lebih tertarik memerkerjakan TKI ilegal.

Departemen Luar Negeri tahun ini berusaha memulihkan status 120 ribu WNI pendatang liar di Sabah, Malaysia dengan menerbitkan paspor khusus bagi TKI. Namun Faizasyah mengakui birokrasi pembuatan paspor Indonesia di Malaysia ini tak bisa dengan cepat dilakukan, terkait pendataan para TKI ilegal tetap harus menunggu itikad baik para majikan mendaftarkan para pekerja mereka ke perwakilan Indonesia terdekat. (Jurnal Nasional)

2. Wapres Minta Pengusaha Tidak Liburan ke Luar Negeri

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia adalah munas yang paling tidak seru dalam sejarah. Waktunya pendek dan kandidatnya hanya satu, yaitu Mohamad S Hidayat.

“Bagi saya, mungkin ada dua alasannya. Hidayat mampu bekerja hebat sehingga tidak ada saingannya. Atau, tidak ada lagi kader Kadin yang mau bekerja di masa sulit sekarang ini. Tentu, hanya kader Golkar yang mau bekerja keras,” kata Wapres dalam Musyawarah Nasional ke-V Kadin Indonesia yang bertajuk, “Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional”, Senin (22/12) di Jakarta.

Dalam munas kali ini, Ketua Umum Mohamad S Hidayat kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin Kadin Indonesia periode 2008-2013. Wapres mengatakan, ke depan, fondasi ekonomi harus diselesaikan dengan baik. Negara berjalan baik apabila makanan pokok bangsa ini terjamin.

Kedua, penyediaan sarana infrastruktur. Listrik, misalnya. Bangsa yang ingin mengembangkan industrialisasi tentu membutuhkan listrik.

Terhadap permintaan *blanket guarantee* yang disuarakan pengusaha, Wapres menegaskan, “Tidak! Kita berpengalaman pada masa krisis. Korbannya pemerintah. Hanya perbuatan segelintir orang, rakyat yang harus tanggung akibatnya.”

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menantang pengusaha untuk membuktikan diri sebagai pengusaha yang bisa mendahulukan kepentingan nasional. Saat ini pasar nasional perlu didongkrak lebih keras lagi.

Oleh karena itu, Wapres meminta semua pihak membuktikan rasa kepentingan nasional, dimulai dengan cara sederhana. “Sebentar lagi, kita akan masuk liburan akhir tahun. Pengusaha janganlah ada yang berlibur ke luar negeri,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Tantangan kedua adalah penggunaan produk dalam negeri. Sepatu kini sudah menjadi lambang nasional, tanpa menyebut kasus pelemparan sepatu terhadap Presiden Amerika George W Bush. Sepatu menjadi lambang nasionalisme yang “hebat”. “Maaf, saya masih pakai sepatu merek Bally, tetapi sebelum datang ke munas ini, saya sudah minta istri untuk membelikan sepatu dalam negeri,” katanya.

Butuh spirit

Wapres mengingatkan, bangsa ini membutuhkan spirit untuk maju. Kadin diharapkan berada dalam satu perahu yang sama untuk sama-sama mengatasi krisis.

Dewan formatur Munas Kadin dipilih untuk bekerja maksimal satu bulan guna membantu ketua umum dalam menentukan Dewan Pengurus Kadin Harian Indonesia selama lima tahun.

Dewan formatur terdiri dari Tonny Ulolli (wakil kawasan Indonesia timur), Adi Putra Tahir (Indonesia tengah), Firmandes (Indonesia barat), dan Suharsoyo (wakil Asosiasi Industri dan Jasa).

Ketua Steering Committee Munas ke-V Kadin Sandiaga S Uno mengatakan, “Periode ini, Munas Kadin memang hanya mempunyai satu kandidat. Ini bukan berarti Kadin kekurangan kader, melainkan merupakan bentuk kesolidan dunia usaha dalam memilih pemimpinnya.” (Kompas)

D. HANKAM

:

1. Kriminalitas Menurun 5,2 Persen

Dibandingkan tahun 2007, tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2008 ini menurun sebesar 5,2 persen. Angka tersebut diumumkan Kejaksaan Agung, berdasarkan data yang diperoleh kejaksaan dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penyerahan berkas sepanjang tahun ini.

"Ini menunjukkan, keberhasilan pemerintah menekan angka kriminalitas di tengah-tengah masyarakat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan di Jakarta, Senin (22/12), saat menyampaikan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2008 yang berlangsung di Cipanas, Jawa Barat, 15-18 Desember 2008.

Dari data yang disampaikan Jasman, pada periode Januari hingga Oktober 2008, terdapat 199.653 SPDP atas perkara tindak pidana umum yang diperoleh kejaksaan se-Indonesia dari penyidik Polri. Dari jumlah itu, 123.241 di antaranya sudah diselesaikan dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama.

Pada periode yang sama, 147.652 berkas perkara telah diterima kejaksaan. Sebanyak 102.683 di antaranya telah diselesaikan dan telah dianggap lengkap atau P21. Sayangnya, tidak diperoleh data tahun 2007 sebagai perbandingan.

"Jaksa Agung menyampaikan, kejaksaan bukan hanya menangani perkara tindak pidana korupsi. Tapi juga menangani tindak pidana umum, termasuk masalah-masalah teroris. Secara khusus Jaksa Agung menyampaikan, kejaksaan akan mendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan Mabes Polri untuk memberantas tindak pidana teroris, serta akan menuntut tinggi perkara-perkara narkoba, penculikan, dan perkara-perkara lain yang menarik perhatian masyarakat," kata Jasman.

Dia juga menyampaikan, hingga Desember 2008 terdapat 121 data putusan pidana mati. Sebanyak 10 terpidana mati di antaranya telah dieksekusi, termasuk Amrozi dan kawan-kawan. Sedangkan yang belum dieksekusi sebanyak 111 orang, dengan rincian 56 terpidana perkara narkoba, 2 orang terpidana perkara teroris, dan 53 orang terpidana perkara tindak pidana umum, melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau pembunuhan berencana.

Berdasarkan status hukum para terpidana mati yang belum dieksekusi tersebut, 17 orang belum menentukan sikap, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau grasi. Lalu, 18 orang masih dalam proses kasasi atau banding, serta 75 orang terpidana menunggu keputusan PK dan grasi.

Satu terpidana mati, Namaona Denish akan dieksekusi bulan ini. Namaona, yang berkewarganegaraan Nigeria tapi berpaspor Malawi, merupakan terpidana kasus kepemilikan satu kilogram heroin. Dia divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, 4 September 2001. Namun oleh putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat (saat itu belum terbentuk Provinsi Banten), dia diputus hukuman mati. Denies mendekam di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Dalam waktu dekat, atau setidaknya-tidaknya sebelum akhir 2008, satu orang terpidana akan segera dieksekusi, mengambil tempat di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten," kata Jasman. (Jurnal Nasional)

2. KSAU Tegaskan Infrastruktur Sukhoi Sudah Siap

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Subandrio mengatakan, seluruh infrastruktur untuk kehadiran tiga pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara (AU) yang baru, sudah siap.

"Seluruh infrastruktur seperti hanggar, termasuk SDM seperti penerbang dan teknisi sudah siap. Kami senang, kalau tiga Sukhoi dapat segera dihadirkan," katanya, di sela-sela penutupan Latihan Gabungan Antiteror TNI-Polri di Jakarta, Senin (22/12).

Subandrio menambahkan, tiga pesawat Sukhoi yang akan datang akhir Desember 2008 akan tiba dan dirakit di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hassanuddin.

Sebelumnya, Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Muda TNIB Eris Herriyanto mengatakan, tiga pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia, segera memperkuat TNI AU, setelah beberapa kali tertunda.

Ketiga pesawat Sukhoi itu akan tiba secara bertahap yakni dua pada Desember 2008 dan satu unit pada Januari 2009. "Ketiganya merupakan jenis SU-30MK2, karena memang jenis

itu yang kini dibutuhkan TNI AU," katanya, yang baru saja pulang dari Rusia untuk menyaksikan *roll out* dua Sukhoi yang akan segera dikirim ke Indonesia pada Desember 2008.

Ia mengatakan, pengadaan tiga pesawat Sukhoi akan segera ditindaklanjuti dengan pengadaan persenjataan yang dibutuhkan TNI AU. "Dengan demikian, tingkat kesiapan operasional TNIB AU, khususnya Skadron Sukhoi dapat segera ditingkatkan," ujar Eris.

Perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada 21 Agustus 2007 mengumumkan penjualan enam pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar 300 juta dolar AS (Rp2,85 triliun). Enam pesawat Sukhoi itu terdiri atas tiga Sukhoi SU-30MK2 dan tiga SU-27SKM, yang akan melengkapi empat pesawat Sukhoi yang telah dimiliki TNI AU sejak September 2003.

Penandatanganan nota kesepahaman pengadaan enam pesawat Sukhoi itu dilaksanakan pada 21 Agustus 2007. Pesawat tempur Sukhoi tersebut menggantikan peran pesawat A-4 Skyhawk dan berbasis di Skadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. (Media Indonesia)

E. HUKUM :

1. Dua Mantan Dubes Diperiksa

Dua mantan Duta Besar RI untuk China Letnan Jenderal Purnawirawan Kuntara dan Laksamana Madya Purnawirawan AA Kustia, Senin (22/12), memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi biaya kawat yang terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) China, periode 2000-2004.

Kuntara dan AA Kustia merupakan Dubes RI untuk China Periode 2000-2004. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, kemarin di Kejagung, Jakarta, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

Namun Marwan memberi isyarat, Kuntara dan AA Kustia tidak akan ditahan. Dia juga mengungkapkan, kedua tersangka berencana mengembalikan uang yang dikorupsinya. "Ada keterangan dari kuasa hukum untuk mengembalikan uang yang digunakannya secara pribadi. Oke, kalau mau mengembalikan segera. Tapi kami belum hitung, karena belum ada hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)."

Kasus yang sedang melibatkan dua mantan dubes tersebut merupakan kasus pungutan biaya kawat yang dilakukan pada bulan Mei 2000 sampai dengan Oktober 2004. Pelaksanaan pungutan tersebut didasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI di Beijing, China Nomor 280/KEP/IX/1999 tentang Tarif Keimigrasian pada 24 September 1999.

Pungutan biaya kawat dikenakan sebesar 55 yuan atau US\$7 per orang kepada pemohon visa, paspor, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Pungutan yang tidak disetorkan ke kas negara mencapai angka lebih dari 10 ribu yuan dan US\$9.613. Berdasarkan ketentuan, segala pungutan yang dilakukan kepada masyarakat harus dimasukkan ke kas negara sebagai Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP).

Marwan menyampaikan, sebagian besar uang hasil pungutan biaya kawat di KBRI China digunakan untuk memberikan pelayanan kepada para tamu dan pejabat Indonesia yang bertamu ke KBRI China pada periode pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputeri. Sebagian lagi, masuk ke kantong pribadi pejabat KBRI, termasuk dua mantan dubes tersebut.

Meskipun kedua tersangka memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang korupsi, namun tetap saja proses hukumnya tidak dihentikan. "Tetap jalan. Ini *kan* periode UU (Undang-Undang) 31/1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Tapi (pengembalian uang itu) akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan," kata Marwan. (Jurnal Nasional)

2. Dalam Setahun, 26 Juta Anak Dilanggar Haknya

Selama kurun 2008, sekitar 26 juta anak telah dilanggar haknya. Bentuk pelanggaran itu berupa kekerasan, pekerja anak, anak telantar, eksploitasi seks komersial, dan putus sekolah.

"Meskipun secara kuantitas pelanggaran yang terpantau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, secara kualitas tetap mengkhawatirkan," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi dalam Catatan Akhir Tahun 2008 di Jakarta kemarin. Kak Seto—

panggilan akrab Seto Mulyadi—menyampaikan, baik secara kuantitas maupun kualitas, kasus kekerasan terhadap anak meningkat dibandingkan tahun lalu menjadi sekitar 6.184 kasus. Modus dan cara yang dilakukan pelaku juga semakin beragam dan mengakibatkan kematian.

"Seperti kasus aborsi, pelaku membuang janin di tempat-tempat yang tidak lazim seperti di tempat sampah atau kali. Begitu juga karena miskin, ada juga orangtua yang meracuni anaknya hingga mati," ungkapnya. Pelaku kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh anak lain (14,87%), tetangga (11,05%), bapak guru (7,37%), dan bapak kandung (3,56%). Adapun lokasinya paling tinggi terjadi di lingkungan sosial (57,41%), disusul sekolah (29,15%), dan terakhir di keluarga (13,43%).

Kak Seto mengungkapkan, untuk kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) juga mendapatkan hasil yang mencengangkan. Sebanyak 150.000 anak menjadi korban pelacuran anak dan pornografi. Jumlah tersebut tersebar dalam berbagai modus kejahatan seperti sindikat pelacuran, pedofilia, pornografi. "Sekitar 70% korban adalah anak yang berusia 14–16 tahun. Sementara korban terbanyak berada di kota-kota besar. Di Jakarta, sedikitnya 10.000 anak terjebak menjadi pelacur. Di Medan, Sumatera Utara, 2.000 anak juga menjalani profesi itu," jelasnya.

Menurut dia, tempat yang rawan terjadinya perdagangan manusia adalah daerah perbatasan. Di wilayah tersebut, mereka dengan mudahnya mendapatkan paspor tidak sesuai usianya. Mereka diselundupkan ke Malaysia, Singapura, dan Jepang. "Daerah rawan itu seperti di Batam dan Nunukan, Kalimantan Timur," papar Kak Seto. Sementara itu, di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak dasar anak untuk hidup dan tumbuh kembang pun masih lemah.

"Masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah, bergizi buruk, dan menderita banyak penyakit menular karena sanitasi yang buruk," tandasnya. Komisioner Bidang Studi dan Analisis Standardisasi Hak dan Perlindungan Anak Komnas PA Roostien Ilyas mengungkapkan, saat ini pelacuran anak mulai berganti tren. Kali ini alasan anak tersebut menjual diri, bukan lagi akibat kemiskinan, tetapi karena tuntutan gaya hidup.

"Dari perjumpaan saya dengan mereka di daerah seperti Jembatan Lima, Jakarta Barat, dan Kapuk Muara, Jakarta Utara, mereka menghabiskan uang hasil melacur untuk membeli pulsa atau mengganti casing handphone," terangnya. Menurut catatan Komnas PA, 459 anak dieksploitasi seksualnya dan 410 orang diperdagangkan untuk kepentingan seksual. Sementara kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 626 kasus berupa pencabulan 129 kasus, sodomi 150 kasus, perkosaan 334 kasus, dan incest 13 kasus. "Selain itu, 1.399.573 anak dipekerjakan di berbagai sektor," ujar Roostien. (Koran Sindo)

F. OLAH RAGA :

1. Indonesia Peringkat Kedua di POM ASEAN

Indonesia berada pada urutan kedua terbanyak total perolehan medali pada Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN XIV 2008 yang diselenggarakan mulai 11-21 Desember 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Merah Putih meraih total 128 medali yang terdiri atas 28 medali emas, 52 medali perak, dan 48 medali perunggu.

Sementara itu, kontingen yang meraih medali terbanyak sekaligus menjadi juara umum adalah tuan rumah Malaysia dengan total sebanyak 216 medali terdiri atas 90 medali emas, 79 medali perak, dan 47 medali perunggu.

Adapun Thailand mengumpulkan medali terbanyak ketiga dengan total sebanyak 120 medali terdiri atas 32 medali emas, 29 medali perak, dan 59 medali perunggu. Total perolehan medali secara keseluruhan bisa diakses di www.aug2008.com.m

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, Senin (22/12). Fasli meminta untuk lebih menggairahkan kegiatan olahraga di kampus. "Kampus dapat dijadikan tumpuan kegiatan olahraga. Perbanyak even-even olahraga untuk setingkat mahasiswa setiap tahun," kata Fasli. (Kompas)

2. Kampanye Sepak Takraw Indonesia Menuju Olimpiade

Indonesia gencar mengkampanyekan cabang sepak takraw menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada ajang Olimpiade.

Ketua umum Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) Syamsurijal di Jakarta, Senin (22/12) mengatakan, duta sepak takraw Indonesia sudah menjajal sejumlah negara di dunia dengan misi menuju Olimpiade.

"Kriteria suatu cabang olahraga dipertandingkan di Olimpiade adalah pesertanya mencapai 60 negara. PB PSTI yakin perjuangan ini akan terwujud," kata Syamsurijal saat acara pembukaan Munas ke-VII PSTI.

Ia mengakui perjuangan cabang sepak takraw dipertandingkan pada *event* terakbar di dunia membutuhkan kegigihan dan memakan waktu lama karena sebagian negara di dunia belum mengenal secara pasti tentang sepak takraw. Namun, setelah mendapat penjelasan dan menyaksikan kepiawaian atlet-atlet takraw Indonesia, seperti di Brasil mendapat perhatian serius.

"Tentu ada alasan bagi Indonesia memperjuangkan cabang olahraga yang berlatar belakang olahraga tradisional tersebut, yakni memperkenalkan budaya Bangsa Indonesia," katanya. Selain itu, cabang sepak takraw dapat menjadi andalan Indonesia mendulang medali emas, perak dan perunggu di Olimpiade atau kejuaraan taraf dunia.

Oleh karena itu, ia mengimbau siapa pun yang akan mengurus cabang sepak takraw di masa mendatang agar memperjuangkan misi menuju Olimpiade. "Tampak pimpinan PB PSTI dapat berganti tetapi kita semua berharap agar program pembangunan demi kemajuan takraw Indonesia dapat ditindaklanjuti," katanya.

Ia menambahkan dirinya siap memimpin cabang sepak takraw periode kedua kalinya (2008-2012), jika terpilih melalui Munas VII. "Saya tidak berambisi memimpin cabang sepak takraw untuk periode kedua kalinya tetapi kalau forum Munas menghendaki maka saya siap mengembang amanah tersebut," kata Syamsurijal yang juga Bupati Bengkalis, seraya menambahkan, Kurun waktu empat tahun kepemimpinannya dinilai tidak cukup untuk membangun sepak takraw menjadi cabang olahraga berprestasi. (Media Indonesia)

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. "Pintu Darurat" Amendemen Komprehensif UUD 1945 oleh Rafiuddin Munis Tamar

Sejak terjadinya reformasi tahun 1998, UUD 1945 tidak lagi dipandang sebagai "pusaka keramat" yang tabu untuk dikaji ulang. Bahkan, salah satu butir tuntutan reformasi kala itu adalah amendemen UUD 1945. Tuntutan reformasi itu ditindaklanjuti oleh MPR hasil Pemilu 1999 dengan melakukan serangkaian amendemen terhadap UUD 1945 yang kemudian menghasilkan perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001), dan perubahan keempat (2002). Hasil amendemen tersebut cukup signifikan. UUD 1945 yang semula hanya terdiri atas 71 ketentuan berubah menjadi 199 ketentuan.

Beragam respons telah ditunjukkan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat atas hasil amendemen tersebut. Ada yang menerimanya sebagai suatu keniscayaan sejarah, ada pula yang tidak dapat menerima dengan alasan yang berbeda-beda. Secara umum, masyarakat yang tidak dapat menerima hasil amendemen UUD 1945 dapat dibedakan menjadi dua kelompok.

Pertama, kelompok yang menentang hasil amendemen dan menginginkan agar negara Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli. Kelompok ini terdiri atas orang-orang yang sejak awal menolak gagasan amendemen UUD 1945. Sikap mereka pada umumnya dilatarbelakangi oleh pandangan yang bersifat emosional. Mereka menganggap UUD 1945 sebagai karya adiluhung sekaligus amanat para pendiri bangsa, sehingga setiap upaya untuk mengubahnya harus dianggap sebagai suatu kedurhakaan. Namun demikian, di kalangan mereka juga ada yang menolak hasil amendemen karena alasan administratif belaka, seperti tidak dimasukkannya hasil amendemen dalam lembaran negara, atau karena alasan yang bersifat filosofis-ideologis, di antaranya karena terjadinya pergeseran nilai dari komunalisme ke arah individualisme.

Kedua, kelompok yang tidak puas dengan hasil amendemen dan menginginkan dilakukannya amendemen lanjutan (perubahan kelima). Mereka yang tergolong dalam kelompok ini menganggap proses amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 1999 telah mengesampingkan aspek akademik dan terlalu banyak mangakomodasi kepentingan jangka pendek partai-partai politik. Akibatnya, struktur dan sistematika UUD 1945 hasil amendemen tidak harmonis dan substansinya pun mengandung beberapa kelemahan.

Pasang Surut

Dua kelompok di atas telah meramaikan diskursus tentang konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia semenjak terjadinya amendemen UUD 1945. Masing-masing kelompok menciptakan arus sendiri-sendiri yang secara terus menerus berdialektika satu sama lain.

Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 yang asli membangun gerakan dengan memanfaatkan titik balik ekspektasi masyarakat terhadap reformasi yang mengalami antiklimaks. Kelompok ini mencoba meyakinkan publik bahwa berbagai persoalan pelik yang dihadapi bangsa Indonesia pascareformasi merupakan konsekuensi logis dari perubahan konstitusi. Namun demikian, kelompok ini tidak mampu membangun argumentasi bahwa UUD 1945 yang asli lebih baik daripada UUD 1945 hasil amendemen sehingga tidak mendapat dukungan yang luas. Gerakan kembali ke UUD 1945 yang asli mencapai puncaknya pada paroh pertama tahun 2006. Setelah itu, gerakan ini kian lama kian surut hingga pada akhirnya nyaris tak terdengar.

Di pihak lain, kelompok yang menginginkan dilakukannya perubahan kelima tidak tinggal diam. Mereka membuat gerakan mulai dari kampus hingga ke Senayan. Selain mengkritisi secara teoretis-akademik, mereka juga mengevaluasi implementasi dari UUD 1945 hasil amendemen. Kelompok ini banyak mendapat simpati ketika mencurahkan perhatiannya terhadap isu-isu yang terkait dengan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Gerakan perubahan kelima UUD 1945 mengalami pasang surut. Gerakan ini sempat meraih dukungan yang cukup luas ketika mengusung isu pemberdayaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada paroh pertama tahun 2007. DPD dipandang perlu untuk diberdayakan karena ia hanya memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan - itu pun terbatas pada isu-isu tertentu yang terkait dengan kepentingan daerah dan keuangan - kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal, proses rekrutmen anggota DPD lebih berat dibanding anggota DPR; anggota DPD dipilih rakyat secara langsung sedangkan anggota DPR dipilih melalui partai politik.

Dalam kenyatannya, isu pemberdayaan DPD itu pada akhirnya harus kandas di Senayan. Meskipun sempat memperoleh dukungan dari beberapa fraksi di DPR dengan DPD sendiri sebagai motornya, namun jumlah pendukungnya tidak mencapai sepertiga dari jumlah anggota MPR sebagai syarat minimal untuk mengusulkan amendemen.

Setelah isu penguatan kewenangan DPD gagal menjadi *entry point* amendemen UUD 1945, isu berikutnya yang diangkat adalah penguatan sistem presidensial. UUD 1945 hasil amendemen dinilai tidak secara tegas menganut sistem presidensial. Hal ini dapat ditengarai dari adanya kewajiban bagi presiden untuk *kulo nuwun* terhadap lembaga negara lain dalam menjalankan beberapa hak prerogatifnya, baik dalam bentuk keharusan untuk mendapat persetujuan maupun sekadar mendapat pertimbangan.

Isu penguatan sistem presidensial melalui perubahan kelima UUD 1945 mencuat ke permukaan sejak Presiden SBY mengemukakan pentingnya melakukan pengkajian ulang terhadap UUD 1945 pada awal tahun 2008. Dalam perkembangannya, gerakan perubahan kelima kian banyak mendapat dukungan. Isu yang diusungnya pun tidak melulu terfokus pada penegasan sistem presidensial, melainkan melebar ke isu-isu lain yang bermuara pada gagasan amendemen secara komprehensif.

Gagasan amendemen UUD 1945 secara komprehensif pada gilirannya sampai juga ke Senayan. Pada September-Oktober 2008, jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai memikirkan cara yang paling efektif untuk melakukan amendemen secara komprehensif, tanpa menyimpangi prosedur perubahan yang sudah ditentukan dalam UUD 1945 sendiri.

Untuk melakukan amendemen UUD 1945 secara komprehensif memang bukan perkara mudah. Selain harus mempersiapkan konsep perubahan secara matang, MPR juga harus melewati prosedur amendemen yang cukup rumit. Rumitnya prosedur amendemen dimaksudkan untuk menghindari seringnya terjadi perubahan konstitusi.

Menyiasati Hambatan Prosedural

Penulis sependapat bahwa sebuah konstitusi harus sulit untuk diubah tetapi tidak dalam pengertian teknis prosedural. Sebuah konstitusi dengan sendirinya akan menjadi sulit diubah manakala materi muatannya senantiasa sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Sementara jika mencermati kesulitan yang dihadapi MPR untuk melakukan perubahan secara komprehensif terhadap UUD 1945 tampaknya murni disebabkan oleh hambatan teknis prosedural.

Pasal 37 UUD 1945 hanya memberi peluang bagi perubahan pasal-pasal. Gagasan perubahan itu pun harus diusulkan secara tertulis dengan disertai alasan oleh minimal sepertiga anggota MPR. Perubahan pasal-pasal tersebut harus dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR dan baru dapat diputuskan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen plus satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Dengan melokalisir perubahan ke dalam lingkup pasal-pasal, Pasal 37 UUD 1945 telah menutup pintu bagi perubahan secara komprehensif. Artinya, MPR tidak mungkin dapat melakukan perubahan dalam skala luas dan mendasar, lebih-lebih jika harus bongkar pasang paradigma, struktur, dan sistematika UUD 1945. Dalam kondisi demikian, tidak ada jalan lain bagi MPR selain membuka "pintu darurat", yakni mengamendemen Pasal 37 UUD 1945 terlebih dahulu. Apabila siasat ini menjadi pilihan, sekurang-kurangnya dibutuhkan dua kali amendemen, yaitu perubahan kelima untuk mengamendemen Pasal 37 UUD 1945 dan perubahan keenam untuk mengamendemen UUD 1945 secara komprehensif. (Jurnal Nasional)

2. Harga BBM Bisa Turun Lagi Rp 1.000 per Liter oleh Dito Ganinduto

Harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar bisa turun lagi masing-masing sebesar Rp 1.000 per liter. Ini jika memperhitungkan biaya produksi BBM berdasarkan patokan harga minyak mentah (crude) dengan rata-rata 40 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah (kurs) Rp 11.000 per dolar AS.

Untuk itu, diperlukan revisi perhitungan penurunan harga premium menjadi Rp 4.000 per liter dari harga berlaku saat ini Rp 5.000 dan harga solar menjadi Rp 3.800 dari harga saat ini Rp 4.800 per liter pada awal 2009 mendatang. Pemerintah juga diminta untuk tidak mengambil kebijakan yang minimalis dengan penurunan yang terkesan dicicil atau setengah-setengah, sehingga dampak positif yang diharapkan justru tidak signifikan dirasakan oleh masyarakat luas.

Desakan penurunan harga tersebut disampaikan pengamat perminyakan Kurtubi dan ekonom Econit Advisory Group Hendri Saparini secara terpisah di Jakarta, Senin (22/12).

"Penurunan harga Rp 1.000 per liter ini sesuai dengan hitungan dengan memperhatikan harga minyak mentah dunia dan kurs dalam biaya pokok produksi bahan bakar di dalam negeri. Biaya pokok sebesar Rp 4.000 untuk premium tersebut sudah termasuk PPN, pajak BBM dan marjin pelaku usaha," kata Kurtubi, menanggapi penurunan harga minyak yang sempat menyentuh level 34 dolar AS per barel dan kembali menguat di kisaran 40 dolar AS.

Turut mengomentari penurunan harga BBM bersubsidi, anggota Panitia Anggaran DPR Dito Ganinduto. Selain kemungkinan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi kembali, Dito mengingatkan, penyesuaian harga BBM industri juga harus segera dilakukan menyusul tren pelemahan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi belakangan ini.

"Bila rata-rata harga minyak mentah pada kisaran 40 dolar AS per barel, tentunya harga bahan bakar untuk industri harus mengikuti penurunan yang cukup signifikan itu karena penetapan harganya telah mengikuti mekanisme pasar," ujar Dito.

Lebih jauh, Kurtubi menegaskan, bila harga minyak menguat di level 48 dolar AS kembali dan nilai tukar rupiah merosot menjadi Rp 13.000 per dolar AS maka biaya produksi premium dan solar tak jauh dari angka Rp 4.500 per liter.

Dia juga mengaku keheranan atas sikap pemerintah yang terkesan sangat berat untuk menurunkan harga BBM di dalam negeri. Padahal, penurunan harga BBM tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan rakyat yang kini sangat lemah dan terlihat jelas dari kemampuan daya beli masyarakat yang semakin rendah.

"Rakyat kini mulai merasakan dampak krisis ekonomi global. Apalagi, dibuktikan dengan ancaman terkena PHK," tuturnya.

Jika saja pemerintah menyetujui penurunan harga hingga Rp 1.000 untuk masing-masing jenis BBM, lanjut dia, diyakini bisa mengurangi beban hidup rakyat. Daya beli masyarakat bakal terangkat. Pabrik-pabrik masih bisa produksi meski tak maksimal, sehingga PHK dapat diminimalisasi.

Besaran penurunan harga yang cukup signifikan itu, akan langsung diikuti dengan penurunan biaya transportasi masyarakat yang saat ini masih cukup tinggi. Sebab, tidak ada alasan lagi bagi regulator seperti Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) untuk tidak menurunkan tarif angkutan, menyusul penurunan harga BBM yang signifikan tersebut. "Mereka bisa dikemplang masyarakat, karena BBM kan turun Rp 1.000 per liter," ujarnya menegaskan.

Diperkirakan pada 2009 pasar minyak dunia masih tertekan oleh lemahnya permintaan (demand). Bahkan, pengurangan produksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebesar 2,2 juta barel per hari belum bisa menaikkan harga minyak dunia. "Penurunan produksi kurang besar, perlu pengurangan 4 juta barel per hari lagi dan mereka menaatinya. Itu kalau OPEC mau harga minyak naik di level 70 dolar AS," ucapnya.

Menurut Hendri Saparini, jika pemerintah melakukan penurunan BBM didasari dengan semangat untuk mendukung sektor riil maka tidak ada penundaan waktu dan pencicilan penurunan harga. "Kondisi krisis finansial global saat ini memang memaksa pemerintah harus mengambil tindakan cepat dan konkret demi perkembangan perekonomian nasional," kata dia.

Menurut hitung-hitungan pemerintah dan DPR, kata dia, harga BBM saat ini seharusnya bisa menyentuh pada kisaran Rp 4.000-Rp 3.750. "Namun, ini hitung-hitungan yang sebenarnya tanpa dilandasi data harga pokok BBM dari PT Pertamina. Kalau memang semangat dari pemerintah dalam menurunkan harga BBM untuk menyelamatkan sektor riil, maka pemerintah harus benar-benar mencari berapa sesungguhnya harga pokok BBM di dalam negeri," katanya.

Untuk itu, Hendri menegaskan, pemerintah agar tidak memberikan kebijakan yang setengah-setengah dalam menurunkan harga BBM di dalam negeri, jika ingin membangkitkan perekonomian pada sektor riil. Diakuinya, kebijakan yang kurang penuh dalam menggairahkan sektor riil ini terlihat dari ditunda-tunda serta dicitilnya penurunan harga BBM.

"Penunda-nundaan pemerintah dalam menurunkan harga BBM yang juga disertai penyicilan penurunan harga, menyebabkan sektor riil belum merasakan dampak yang signifikan akibat penurunan harga BBM tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Dito Ganinduto menilai, perkembangan harga minyak saat ini tampak tidak wajar karena penurunannya berlangsung sangat cepat sehingga diperlukan evaluasi lebih saksama oleh pemerintah. Namun, bila lonjakan harga minyak mentah kembali terjadi di atas 80 dolar AS per barel atau dua kali harga minyak saat ini, Dito mengatakan, batas atas harga BBM sebesar Rp 6.000 per liter solar bisa segera diterapkan.

"Saat ini sudah ada harga harga maksimum (batas atas -Red), jadi masyarakat tidak perlu resah ke depan. Sebaliknya, dari perkembangan yang terjadi, titik terendah harga minyak hanya bisa mencapai 30 dolar AS nantinya," tuturnya.

Harga minyak yang saat ini berada di sekitar 40 dolar AS akan bisa bertahan pada tahun depan, bahkan bisa terjadi pelemahan pada 2009 sehingga bisa berada di bawah 40 dolar AS akibat anjloknya pertumbuhan perekonomian dunia. "Saya pikir proses penurunan masih berlangsung, tapi tidak sedrastis yang pertama," ujarnya.

Menurut Dito, pertumbuhan ekonomi negara maju akan semakin anjlok pada 2009 bila perbankan di luar negeri gagal memfasilitasi perekonomian. Di sisi lain, apabila AS gagal melakukan perbaikan pada 2009, maka proses pemulihan di akhir tahun 2009 juga amat susah. "Pertumbuhan ekonomi 2009 anjlok itu sudah tidak ada pertanyaan lagi, tinggal berapa besar anjloknya dan tergantung berapa besar perbankan luar negeri mampu memfasilitasi kegiatan ekonominya. Kalau masih mengalami kesulitan, bisa jadi perlambatan ekonomi lebih dalam," tuturnya.

Di lain pihak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, setelah sidang OPEC di Iran pada 17 Desember lalu harga minyak justru cenderung turun. Untuk itu, pihaknya kini tengah melakukan evaluasi untuk kemungkinan menurunkan kembali harga BBM bersubsidi. (Suara Karya)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Court reigns supreme

Indonesia has specifically stated that people's productive years are between the ages of 18 and 55, but there is little agreement on an appropriate retirement age.

Educators and scientists can work for paid employment until they are 60 years old, and police and military generals until 58. Judges will set a new record at 70, after the House of Representatives passed the bill on the Supreme Court last week.

The retirement age for Supreme Court justices sparked a heated debate, with some groups accusing the highest judicial institution of seeking to prolong the term of then chief justice Bagir Manan.

The allegations proved baseless as Bagir eventually retired last month. Yet the controversy dragged on until the day the House approved the bill.

That the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) forced the House only to work more rather than to change the article on the retirement age is indicative that the debate missed the point anyway.

The issue of retirement age was blown out of proportion when the public overlooked the more pressing issue of reform, which has eluded the Supreme Court since the winds of change started blowing in 1998.

The newly passed bill keeps the Supreme Court unsupervised, dismissing a checks-and-balances mechanism in the judicial branch of power.

The Judicial Commission, which was originally established to prevent the Supreme Court from holding absolute power, is authorized only to conduct ethical investigations into judges, according to the bill.

This reduces the Constitution's mandate for the Judicial Commission to uphold the integrity and dignity of judges.

The bill says the Supreme Court holds the highest authority to supervise the judicial process at all court levels, putting the Judicial Commission at a lower position than the Supreme Court. This article goes against the wisdom of supervision, which should be conducted by an outside party.

Knowing that internal supervision is prone to collusion and corruption, the government plans to scrap the inspectorate general as a supervisory institution of the bureaucracy and introduce external supervision.

While the bureaucracy, which is regarded as a corruption-infested institution, is looking for change, the Supreme Court is resisting reform.

A blueprint of reform within the Supreme Court was introduced in October 2003 to build an accountable, transparent and competent judiciary.

Many have expected the reform to put an end to the "judicial mafia" or judicial corruption, in which judges choose money over justice.

Former chief justice Bagir Manan repeatedly denied there was any mafia. But one of the serving Supreme Court justices, Artidjo Alkostar, says the mafia prevails, although it is not visible.

Bagir himself once faced allegations of accepting a bribe, when businessman Probosutedjo, who is a half-brother of former president Soeharto, confessed in 2005 to being asked for money to have the Bagir-led Supreme Court panel of justices acquit him. The businessman said he had handed over Rp 16 billion, Rp 5 billion of which was allocated for Bagir.

Corruption Eradication Commission investigators searched the office of the powerful Bagir, who was later found to be clean.

The Corruption Court finally sentenced five Supreme Court clerks, but dismissed any link between them and the panel of justices. The public had expected the convicts to bark back at the justices by appealing the verdict, but that never eventuated.

A lot has actually been done in line with the blueprint of judicial reform, which was drafted with full support from the multidonor Partnership of Governance Reform. The salary of judges of all levels has been significantly increased in a bid to prevent judges from being tempted by corruption, transparency in case-handling mechanisms has been implemented and the Judicial Commission has been involved in recruiting Supreme Court justices.

But the reform appears to stop at nonsubstantial issues.

The blueprint's recommendation for improvement in the supervision mechanism of the Supreme Court has been stalled by the newly endorsed bill. The nonreformist bill is the work of the political elite in the executive and legislative branches of power, which should have encouraged and expressed their political will to realize the long-sought judicial reform.

At a time when the public's trust in the judiciary remains low, both the House and the government have colluded to send the efforts to reform the Supreme Court back to square one. (The Jakarta Post)

Jakarta, 23 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu